

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

TAHUN 2025



**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**Jln.Ir.Soekarno – Kadula
SUMBA BARAT DAYA**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya disusun sesuai dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan tersusunnya LKIP Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA kabupaten Sumba Barat Daya, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025.

Penyusunan LKIP Bagian Pengadaan Barang/Jasa ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya ini dapat mencerminkan kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Tambolaka, 12 Januari 2026

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa,



Heribertus D. Hakalolu, S.Sos
Pembina Tk.I -IV/b
NIP. 19760723 200501 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT LAKIP	4
C. PROFIL BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. RENCANA ANGGARAN.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PROSES PENGUKURAN KINERJA	13
B. REALISASI KEUANGAN	15
BAB IV PENUTUP	17
A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	17
B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA	19
LAMPIRAN – LAMPIRAN:	
1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025.....	20
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	21
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	22
4. RENCANA STRATEGIS DAN PPS TAHUN 2025.....	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Eksistensi Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu dari delapan unit otonom yang berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, tentu memiliki visi, misi dan tujuan strategis. Untuk mewujudkannya, maka ditetapkan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan, (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE).

Dalam upaya untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada tahun anggaran 2025 Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan 2 (Dua) program dan 7 (Tujuh) kegiatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sasaran yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UMK Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE).

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100% atau Sangat Berhasil Dalam usaha mencapai sasaran tersebut ditetapkan 2 (Dua) Program dan 7 (Tujuh) kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Pencapaian sasaran.

Dari Indikator sasaran tersebut nampak bahwa rata-rata presentase nilai kinerja yang dicapai adalah 97,17%. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut pada tahun Anggaran 2025 mencapai kinerja Sangat berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan tahun 2024 maka menunjukkan ada peningkatan kinerja.

Meninjau dari rencana lima tahunan dalam rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2025, sasaran tersebut diatas menunjukkan pencapaian kinerja sudah sesuai dengan yang direncanakan.

Tambolaka, 12 Januari 2026

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa,


Heribertus D. Hakalolu, S.Sos
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 19760723 200501 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. PENDAHULUAN

Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu unit otonom yang berkedudukan di dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Sumba Barat Daya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya No. 17 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan demikian, Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan Daerah yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Sebagai unit otonom maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa diberi ruang untuk melaksanakan program/kegiatan strategis. Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut maka, dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pelaksanaan Program, kegiatan dan Anggaran tersebut, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan setelah tahun anggaran berjalan. Sarana yang digunakan untuk dipertanggungjawabkan adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dasar acuannya Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB RI No.29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN RI. No.239/XI/16/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Permen PAN-RB Bab 1V Pasal 12, disebutkan LKIP adalah Laporan Kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pada Pasal 16 ayat 1, menyebutkan LKIP berisi ikhtisar pencapaian pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran sesuai ayat 2, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi;
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja ; dan
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa wajib membuat LKIP Tahun 2025. Sedangkan bagan struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa, sesuai dengan Peraturan Bupati No.17 Tahun 2022 tersebut, sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA



2. SUMBER DAYA MANUSIA

Kadaan pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Bulan Desember 2025 saat ini sebanyak 22 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut latar belakang pendidikan :

- Sarjana (S2) : - Orang
- Sarjana (S1) : 16 Orang
- D3 : 2 Orang
- SLTA : 4 Orang
- SLTP : - Orang
- SD : - Orang

b. Menurut golongan :

- Golongan I = orang
- Golongan II = 5 orang
- Golongan III = 15 orang
- Golongan IV = 1 orang
- Tenaga Kontrak = 1 orang

c. Yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan dan Perencanaan :

- Diklatpim III = 1 orang.
- Diklatpim IV = 1 orang.

d. Jumlah Jabatan Struktural :

- Eselon III = 1 Jabatan.

3.SARANA DAN PRASARANA.

Sarana dan prasarana kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Setda Kabupaten Sumba Barat Daya sekarang ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket	
			Baik	Rusak
1.	Mobil	1	Baik	-
2.	Sepeda Motor	1	Baik	-
3.	Mesin Ketik	-	-	-
4.	Mesin Hitung/Jumlah	-	-	-
5.	Mesin Kalkulator	-	-	-
6.	Rak Besi/Metal	-	-	-
7.	Filling besi/Metal	-	-	-
8.	Alat pemotong Kertas	-	-	-
9.	Alat Kantor lainnya	-	-	-
10.	Lemari Kayu	3 Buah	Baik	-

11.	KursiBesi/Metal	-	-	-
12.	MejaRapat	-	-	-
13.	KursiPutar	-	-	-
14.	Meja Biro	-	-	-
15.	KursiPlastik	-	-	-
16.	KursiKerja	-	-	-
17.	AC	2 Buah	Baik	-
18.	Server Komputer	1 Buah	Baik	-
19.	Mini Komputer	-	-	-
20.	P.C Unit/Komputer	3 Buah	2 Baik 1 Rusak	-
21.	Laptop	8 Buah	3 Baik 5 Rusak	-
22.	Peralatan mini computer	-	-	-
23.	Flashdik	-	-	-
24.	Peralatan Personal Komputer	-	-	-
25.	Printer	7 Buah	2 Baik 5 Rusak	-
26.	UPS	1	Baik	-
27.	Hardisk Eksternal	-	-	-
28.	Peralatanj aringan	-	-	-
29.	Switch Hub	-	-	-
30.	Wireless lan (USB)	-	-	-
31.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-
32.	Meja tamu Ruangan Biasa	-	-	-
33.	Kursi kerja Pejabat	-	-	-
34.	Kursi Sofa	-	-	-
35.	Komputer Mainframe /server	1 Buah	Baik	-
36.	Peralatan Jaringan	-	-	-
37.	Komputer/Internet	-	-	-
38.	Lemari Rak	-	-	-
49.	Terali Besi	-	-	-
40.	Brankas	-	-	-
41.	Kunci Sidik jari	-	-	-
42.	Alat Pemadam kebakaran	-	-	-
43.	Prolink	2 Buah	Baik	-
44.	Mikrotik	1 Buah	Baik	-
45.	UPS Server	2 Buah	Baik	-

Sedangkan kondisi ruangan yang ada :

- a. Ruang Kepala (Belum Ada).
- b. Ruang Staf (Belum Ada)

B. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Tujuan dan manfaat pembuatan LKIP yang disampaikan disini sesuai dengan amanat Inpres No.7 Tahun 1999 dan SK LAN No.239 Tahun 2003

1. Tujuan Pembuatan LKIP yaitu :

- a. Memberi Pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada tahun anggaran yang telah berjalan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam menapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dalam upaya mencapai visi dan misi.
- c. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan, baik jangka pendek maupun menengah.
- d. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumberdaya yang menjadi kewenangan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- e. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

2. Manfaat

Manfaat Pembuatan LKIP yaitu :

- a. Mendorong instansi Pemerintah, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan (dan pembangunan) secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

C. PROFIL BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian
- b. Sub Koordinator, terdiri dari:

- 1) Sub Koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda);
- 2) Sub Koordinator Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda);
- 3) Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam menyusun Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya 2025-2030 dan memperhatikan RPJMD Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pernyataan Visi

Visi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah **"Mewujudkan Unit Kerja Yang Unggul Dalam Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Profesional dan akuntabel."**

2. Pernyataan Misi

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pengadaan Barangg/Jasa yang benar dan terarah sesuai dengan prinsip pengadaan Efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel.
- b. Peningkatan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE) sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Mengembangkan SDM Pengadaan Barang/Jasa yang profesional dan kompeten

3. Penetapan Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda kabupaten Sumba Barat Daya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mengukur sejauhmana Visi dan misi Organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi, misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Sumba Barat daya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan hasil penataan kelembagaan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
- b. Mengoptimalkan disiplin dan tertib aparatur.
- c. Meningkatkan pemanfaatan Analisa formasi jabatan sesuai dengan beban kerja dan kompetensi jabatan.
- d. Mendorong peningkatan akuntabilitas organisasi perangkat daerah.

4. Penetapan Sasaran.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan 1 (satu) sasaran strategi ssebagai berikut :

Sasaran : "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan"
(Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE)

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kerja</i>	<i>Target (%)</i>	<i>Program/Kegiatan</i>	<i>Anggaran (RP)</i>
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sector Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	184.596.412,00
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.518.300,00
			✓ Sub Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.700.300,00
			✓ Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.818.000,00
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.527.512,00
			✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.447.512,00
			✓ Sub Keg. Penyediaan Jasa	3.080.000,00

			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.218.100,00
			✓ Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.218.100,00
			Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.076.500,00
			✓ Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.076.500,00
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.120.000,00
			✓ Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.120.000,00

			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.136.000,00
			✓ Sub Keg. Pendidikandan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.136.000,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Keg. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	337.362.500,00
			✓ Sub. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	179.948.000,00
			✓ Sub Kegiatan Pengelolaan LayananPengadaan Secara Elektronik	139.031.000,00
			✓ Sub Keg. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	18.383.500,00

B. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2025 Sebesar Rp. 521.958.912,00
Terdiri dari:

- a. Belanja Barang dan Jasa = Rp. 521.958.912,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PROSES PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dimaksud untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi :

1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Proses Pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi :

- a. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya SDM, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/Jasa (fisik/dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang dihasilkan
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. PENETAPAN KINERJA

Langkah selanjutnya setelah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2025 dengan Perubahan Anggaran tahun 2025.

3. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian Kinerja :

Persentase Pencapaian $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Rencana tingkat capaian = Rencana

Dari pengukuran Kinerja ini akan menggambarkan pencapaian kinerja kegiatan dan program untuk mencapai sasaran SKPD/Unit yang telah ditetapkan. Formulir PKK dan PPS menjadi lampiran

Predikat penilaian capaian kerja kinerja sasaran dikelompokkan dalam “*skala pengukuran Ordinal*” sebagai berikut :

NO	Skala PersentaseCapaian Kinerja	Predikat
1	85%-100%	Sangat Berhasil
2	70%-84%	Berhasil
3	55%-69%	CukupBerhasil
4	< 55%	TidakBerhasil

4. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran : “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan” (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE)

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. Dalam usaha mencapai sasaran tersebut, ditetapkan 2 (Dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 11 (Sebelas) Sub Kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja Nampak seperti dalam table berikut:

No	Indikator sasaran	Tahun 2025		% Pencapaian Target
		(3) Target	(4) Realisasi	
(1)	(2)			(5)
1	Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE	100	100%	100%
	Rata-rata	100	100%	100%

Dari Indikator sasaran tersebut Nampak bahwa rata-rata presentase nilai kinerja yang dicapai adalah 100%. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut pada tahun anggaran 2025 mencapai kinerja **Sangat Berhasil**.

Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Rencana Strategis (Renstra), sampai dengan tahun 2025, maka sasaran tersebut di atas menunjukkan pencapaian kinerja sesuai yang direncanakan yaitu 100%.

Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut diatas, telah direncanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan Sosialisasi dan Pemberian Materi Regulasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
2. Menjadikan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja dalam bertindak.
3. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.
5. Mengajukan Telaahan staf kepada Pimpinan Daerah untuk menetapkan alat kendali Pembangunan.

B. REALISASI KEUANGAN

Kemampuan Pengelolaan anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 dapat disampaikan melalui table berikut ini.

Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Program 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	184.596.412,00	183.613.159,00	99,46
Program 2	Program Perekonomian dan Pembangunan	337.362.500,00	323.618.220,00	95,92
Jumlah		521.958.912,00	507.231.379,00	97,17

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja realisasi pelaksanaan anggaran mencapai 97,17% atau termasuk sangat baik. Pencapaian realisasi anggaran tersebut melampaui target yang direncanakan yakni 95 %. Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dibelanjakan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam usaha mencapai sasaran kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan (Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE), pada tahun 2025 telah dilaksanakan program dan kegiatan, dengan kinerja keberhasilan dan kegagalan, sebagai berikut :

1. Keberhasilan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kinerja yang *berhasil* meliputi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

c) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa
 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

B. RENCANA TINDAK STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA

Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan meminimalisir terjadinya kegagalan kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Kinerja
 - a. Membina disiplin waktu dan kerja pegawai yang ada secara teratur
 - b. Membagi tugas pekerjaan kepada pegawai secara merata dan baik
 - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan sasaran
 - d. Melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan secara tepat waktu.

- e. Meningkatkan motivasi dan kualitas kerja pegawai imelalui pelatihan dan Bimtek.
2. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif
- a. Mengontrol secara baik tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai
 - b. Melakukan diskusi-diskusi untuk mengatasi permasalahan yang ada
 - c. Menerapkan SOP secara baik.

Demikian LKIP ini, semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan pelayanan masyarakat ke depan.

Tambolaka, 12 Januari 2026
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa,



Heribertus D. Hakalolu, S.Sos
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 19760723 200501 1 007

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE	100 %

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
Sasaran1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan				
Program 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	184.596.412,00	183.613.159,00	99,46
Program 2	Program Perekonomian dan Pembangunan	337.362.500,00	323.618.220,00	95,92
Jumlah		521.958.912,00	507.231.379,00	97,17

Tambolaka, 12 Januari 2026

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa,



Heribertus D. Hakalolu, S.Sos
Pembina Tk.I-IV/b
NIP. 19760723 200501 007

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD/Unit kerja Mandiri
Tahun Anggaran

: Bagian Pengadaan Barang/Jasa
: 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari Sektor Pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM Yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE	100	100	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025

: Rp.521.958.912,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025

: Rp. 507.231.379,00

RENCANA STRATEGIS DAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

PPS							PKK					
URAIAN	INDIKATOR	SAT	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari SektorPertanian, Perdagangan, Perindustrian dan UKM yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan	Cakupan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dilakukan Melalui LPSE	%	95	95	95	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota	1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah a. Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MASUKAN Dana KELUARAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan HASIL Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Persediaan dan Jasa Perkatoran	Rp.	2.700.300,00	2.700.300,00	100

b. Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MASUKAN Dana	Rp.	44.818.000,00	44.634.760,00	99,59
	KELUARAN Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
2. Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	HASIL Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
a. Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MASUKAN Dana	Rp.	27.447.512,00	27.447.512,00	100
	KELUARAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				
	HASIL Persentase penyediaan jasa				

penunjang urusan pemerintahan Daerah					
b. Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	MASUKAN				100
	Dana				
	KELUARAN				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				
3. Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	HASIL				
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a. Sub keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan,	MASUKAN				
	Dana				
	KELUARAN				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang				
		Rp	18.218.100,00	18.155.609,00	99,66

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan	
	Pajaknya	
	HASIL Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
4. Keg. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
b. Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	MASUKAN Dana	100
	KELUARAN Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKP	1.076.500,00
	HASIL Persentase Tersedianya Dokumen RKA- SKPD	1.076.500,00
		Rp.

5. Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	MASUKAN Dana	Rp	27.120.000,00	27.120.000,00	100
		KELUARAN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD HASIL Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
6. Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	MASUKAN Dana	Rp.	60.136.000,00	59.398.572,00	99,77
		KELUARAN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pelatihan HASIL Persentase Jumlah Pegawai Yang Mengikuti				

2. Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Keg. Pengelolaan Barang dan Jasa	Perencanaan dan Pendidikan				
	a. Sub Keg. Pengelolaan barang dan Jasa	MASUKAN Dana	Rp.	179.948.000,00	167.648.000,00	93,16
		KELUARAN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
		HASIL Presentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang sesuai Dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)				
	b. Sub Keg. Pengelolaan Layanan secara Elektronik	MASUKAN Dana	Rp.	139.031.000,00	138.036.720,00	99,28
		KELUARAN Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
		HASIL Presentase Proses				

